



**PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR SOP	: 03/SOP-PPID/EKON/2021
TGL. PEMBUATAN	: 30 Maret 2021
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 01 April 2021
DISAHKAN OLEH	: Kepala Biro Perekonomian Setda. Provinsi Nusa Tenggara Barat
NAMA SOP	: SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

DASAR HUKUM :

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi Publik
4. Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/Ketua-KIP//2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Keberatan atas Informasi
2. Memahami tentang Pelayan Informasi Publik

KETERANGAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :


Formulir Keberatan
Softcopy Formulir Keberatan
Perangkat Keras (Hardware): Laptop, Printer, Balpoint dan Cap Garuda

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah Salah Satu Tugas dari Komisi Informasi Pusat, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Penanganan Sengketa Informasi Publik pada PPID Komisi Informasi Pusat tidak berjalan

Dokumen Penanganan Sengketa Informasi Publik

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	waktu	Output	
1	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi				Relas Persidangan dari Komisi Informasi/Pengadilan	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan surat kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat Kuasa dari Atasan PPID	
3	Menganalisis dan membuat pertimbangan Tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat Kuasa dari Atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan prosedur Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian sengketa informasi yang dihadapi				Pertimbangan tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Risalah/ Berita acara persidangan. 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	

Kepala Biro Perencanaan
 Setda Provinsi NTB

 Hj. Eva Dewiyani, SP
 NIP. 19701210 199803 2 006